

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

I. Perkembangan inflasi dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta resiko kedepan. a. Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi yang rendah pada bulan Oktober 2021 sebesar 0,36% (mtm) sedikit meningkat dibanding September 2021 dan tercatat lebih tinggi dari realisasi inflasi kawasan Sumatera yang hanya sebesar 0,17% (mtm). Inflasi bulan Oktober bersumber pada peningkatan harga komoditas cabe merah, angkutan udara, minyak goreng, daging ayam ras dan air kemasan. Terjadinya Inflasi terhadap komoditas cabe merah disebabkan oleh keterbatasan pasokan lokal akibat curah hujan yang tinggi dan terbatasnya pasokan cabe merah dari pulau Jawa seiring belum masuknya masa panen raya. Peningkatan harga minyak goreng didorong oleh kenaikan harga CPO global yang mendorong peningkatan harga sawit lokal dan keterbatasan pasokan akibat penurunan produksi sawit karena cuaca yang buruk. Sedangkan kenaikan pada harga daging ayam ras disebabkan oleh kenaikan harga pakan yang mendorong peningkatan biaya produksi. Disisi lain komoditas bawang merah mengalami penurunan disebabkan melimpahnya pasokan lokal maupun pasokan dari pulau Jawa. b. November 2021 Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 0,65% (mtm) atau sedikit meningkat dibanding realisasi inflasi bulan Oktober 2021, sedikit lebih tinggi dibanding inflasi Nasional yang hanya sebesar 0,37% (mtm), namun secara tahunan inflasi Sumatera Barat pada bulan November tercatat sebesar 1,64% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional yang tercatat sebesar 1,75% (yoy). Inflasi Sumatera Barat ini didorong oleh komoditi angkutan udara, cabe merah, minyak goreng, telur ayam ras dan emas perhiasan. Peningkatan tarif angkutan udara didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat pasca penurunan level PPKM di wilayah Kota Padang dan sebagian besar wilayah di Indonesia serta meningkatnya permintaan menjelang HBKN natal 2021 dan Tahun baru 2022. Peningkatan harga komoditas cabe merah diakibatkan oleh keterbatasan pasokan ditengah curah hujan yang cukup tinggi serta telah selesainya panen raya di Sumatera Barat. Sedangkan untuk harga minyak goreng meningkat disebabkan masih tingginya harga komoditas CPO global, sementara untuk harga telur ayam ras mengalami peningkatan disebabkan oleh normalisasi harga telur karena sebelumnya mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. c. Desember 2021 Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 1,40% (yoy), realisasi inflasi ini tercatat lebih rendah dibanding rata-rata historis perubahan harga pada bulan Desember selama tiga tahun terakhir (2018-2020) yang tercatat sebesar 2,13% (yoy) hal ini masih didorong oleh kenaikan harga komoditas utama angkutan udara, daging ayam ras, minyak goreng, bawang merah dan bioskop.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

II. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah. Mencermati perkembangan inflasi terkini pergerakan IHK Sumatera Barat diperkirakan akan mengalami penurunan pada bulan Januari 2022 yakni pada kisaran -0,04%-0,36% (mtm) sehingga secara tahunan inflasi Januari 2022 diperkirakan sebesar 1,38-1,78% (yoy), namun secara keseluruhan laju inflasi Sumatera Barat pada tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 1,89% (yoy) atau mengalami peningkatan dibanding realisasi inflasi tahun 2021 yaitu diangka 1,40% (yoy). Penurunan IHK Sumatera Barat pada bulan Januari 2022 diperkirakan didorong oleh peningkatan harga komoditas aneka rokok sebagai dampak kenaikan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 12% di tahun 2022. Keputusan pemerintah untuk mulai menaikkan harga LPG non Subsidi pada tanggal 25 Desember 2021 diperkirakan turut mendorong peningkatan harga komoditas bahan bakar rumah tangga, disisi lain inflasi secara keseluruhan diperkirakan tetap rendah karena

didukung oleh normalisasi harga pangan maupun komoditas angkutan udara pasca HBKN Natal dan tahun Baru.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

III. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah. Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi ditengah pandemi covid-19 agar inflasi di Sumatera Barat tetap berada pada rentang target inflasi sebesar 3,0%+1% (yoy). Pada triwulan IV Tahun 2021, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi diantaranya sebagai berikut: 1. Tim Pengendalian Inflasi telah mengadakan Rapat Koordinasi pengendalian harga Sembako yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 10 November 2021. 2. Pelaksanaan pasar murah pada tanggal 17 November s.d 17 Desember 2021 yang dilakukan di 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yaitu Kota Padang Panjang, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota dalam rangka mitigasi inflasi menjelang HBKN dan Tahun Baru. 3. Penyaluran bahan pangan murah melalui fasilitas TTIC dan Distribusi langsung menggunakan mobil Box keliling. 4. Koordinasi Satgas Pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan. 5. Optimalisasi penyampaian informasi harga melalui media sosial untuk mendorong komunikasi kepada masyarakat dalam menjaga ekspektasi masyarakat. 6. Koordinasi stabilitas harga dan ketersediaan pasokan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru pada tanggal 30 November 2021. 7. Keikutsertaan pejabat dan staf pengelola kegiatan pengendalian inflasi dalam rapat koordinasi TPID se Indonesia dalam rangka pembahasan Roadmap pengendalian Inflasi daerah Tahun 2022-2024. 8. Keikutsertaan pejabat dan staf pengelola kegiatan pengendalian inflasi dalam Rakorwil TPID se Sumatera pada tanggal 3 Desember 2021 dalam rangka menindaklanjuti Rakornas TPID se Indonesia. 9. Guna percepatan penyusunan Roadmap TPID tahun 2022-2024 TPID Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat dengan OPD terkait pada tanggal 20 Desember 2021.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

IV. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah. Menindaklanjuti hasil HLM TPID tanggal 10 November 2021, pengendalian harga sembako di Provinsi Sumatera Barat melalui surat Gubernur Nomor 500/665/Perek-KE/2021, telah menyurati para Pimpinan BUMN/BUMD dan anggota Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Sumatera Barat agar berpartisipasi melalui berbagai bentuk kegiatan yang dapat menciptakan stabilisasi ketahanan pangan dan menekan terjadinya lonjakan harga sembako melalui penggunaan dana CSR Perusahaan. Sehubungan dengan hasil koordinasi dan evaluasi, terkait dengan beberapa kebijakan tersebut di atas, guna menjaga stabilitas harga pangan dan pencapaian inflasi Tahun 2021 agar tetap berada pada rentang target inflasi sebesar 3,0%+1% (yoy), Tim Pengendalian Inflasi daerah telah menetapkan beberapa strategi/upaya dalam pengendalian inflasi daerah di Sumatera Barat terutama dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid-19. Adapun upaya dan strategi dimaksud antara lain: a. Tetap melakukan koordinasi dengan pengusaha minyak goreng yang ada di Sumatera Barat seperti PT Incasi Raya. b. Terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan TPID Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan HLM TPID tingkat Kabupaten/Kota. c. Bekerjasama dengan BUMD/BUMN dan perusahaan swasta lainnya melalui forum CSR untuk melaksanakan operasi pasar/subsidi harga dan bantuan khusus untuk Komoditi minyak goreng, telur, cabe dan beras. d. Mendorong produsen yang memiliki industri kepala sawit agar terintegrasi dari hulu ke hilir supaya menyediakan CPO dengan harga khusus untuk diproduksi jadi minyak goreng.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5.

V. Rekomendasi Kebijakan pengendalian inflasi di daerah 1. Meningkatkan Koordinasi antar TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/ Kota melalui rapat HLM dan rapat-rapat koordinasi lainnya dalam mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menekan laju inflasi. 2. Mengoptimalkan Kooordinasi dengan Pertamina dalam rangka mengantisipasi kelangkaan LPG. 3. Menjaga agar tidak terjadi peningkatan harga pangan dengan memastikan stok pangan cukup, sehingga tim TPID perlu kerja keras untuk memetakan risiko kebutuhan pangan di tiap daerah di Sumatera Barat. 4. Meminta kepada produsen minyak goreng tetap menjaga pasokan dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan minyak goreng melalui penyediaan minyak goreng kemasan sederhana di pasar ritel dan pasar tradisional yang dijual sesuai HET 5. Meminta kepada Tim Satgas Pangan agar selalu giat mengawasi praktik penimbunan bahan pangan.